



RENJA

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL

TAHUN 2026

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Berakuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

#DINSOS
HUMANIS
ADAPTIF
DEDIKATIF
INKLUSIF
RESPONSIF

Hadir

Email : dinsos@kukarkab.go.id Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id>



Copyright: wordexceltemplates.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rencana Kerja PD Dinas Sosial Tahun 2026** dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan perkiraan untuk tahun berikutnya, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan / ketidak sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENCANA KERJA PD ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 14 Agustus 2026



Plt. Kepala Dinas,

Drs. Yuliandris Suherdian

Pembina Tk. 1

NIP. 19680708 199403 1 013

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA_PD Tahun Lalu dan Capaian RENJA_PD	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.	68
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJAx PD	73
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	76
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan wajib bidang sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk tahun 2026 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada

tahun 2026 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, RENSTRA Dinas Sosial dan RENJA Dinas Sosial.

1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan perundangan dibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-

Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

- 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) ;
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ;

36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
39. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
40. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3

- Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 – 2043;
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2043;
 51. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah :

1. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam Rencana Strategis sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan.
4. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rancangan RENJA Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah dengan

RENJA K/L dan RENJA Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan RENJA Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial memuat penjelasan terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

DINAS SOSIAL berisikan masalah atau tantangan utama yang dihadapi oleh DINAS SOSIAL dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yang meliputi aspek pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, koordinasi antar instansi, serta pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Isu-isu ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DINAS SOSIAL, seperti pengelolaan anggaran, SDM, kebijakan, serta sistem pengawasan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD memuat penjelasan tentang proses evaluasi, penelaahan, dan analisis terhadap rancangan awal RKPD oleh pihak terkait, baik internal pemerintah daerah maupun pihak eksternal, untuk memastikan kesesuaian, kelayakan, dan keselarasan rancangan tersebut dengan tujuan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat memuat proses evaluasi dan kajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap usulan program atau kegiatan yang diajukan oleh masyarakat, untuk menilai kelayakan, kesesuaian, dan prioritas usulan tersebut dalam rangka mendukung tujuan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat. Langkah-langka penelaahan mulai dari verifikasi kelayakan usulan, analisis kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah, evaluasi anggaran dan sumber daya, partisipasi masyarakat dan identifikasi potensi dampak sosial dan lingkungan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional memuat tentang proses sistematis dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada tingkat nasional guna menilai efektivitas, relevansi, dampak, serta implikasinya terhadap berbagai sektor dan kelompok masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah memuat rumusan tentang hasil akhir yang ingin dicapai dalam satu tahun oleh perangkat daerah, bersifat umum, strategis, dan menjadi pedoman bagi kebijakan serta perencanaan daerah berdasarkan isu-isu strategis serta sasaran yang merupakan hasil yang lebih spesifik dan terukur, yang menjadi langkah konkret dalam mencapai tujuan, serta digunakan sebagai dasar dalam menyusun program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan kata lain, **tujuan memberikan arah kebijakan, sedangkan sasaran menerjemahkannya ke dalam target yang lebih konkret dan dapat diukur dalam pelaksanaan program tahunan perangkat daerah.**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

memuat uraian garis besar mengenai program dan kegiatan, meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan perubahan RENJA, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Didalam Penutup memuat catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut .

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial tahun lalu dan capaian RENSTRA Dinas Sosial

Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2024 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu SKPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan.

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2024 adalah faktor sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat

Kabupaten. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari yang semula disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk bidang sosial terdapat 7 program yang meliputi : Program Pemberdayaan Sosial; Program Penanganan Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana serta Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target 6 Dokumen; realisasi 6 Dokumen (100%)
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD target 12 Laporan; realisasi 12 Laporan (100%)
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 8 Laporan; realisasi 8 Laporan (100%)

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target 1.106 Orang/Bulan; realisasi 913 Orang/Bulan (82,55%)
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD target 12 Laporan; realiasi 12 Laporan (100%)

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Target 4 Laporan; realisasi 3 Laporan (75%)
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pendataan dan Pengolahan Data Kepegawaian target 2 Dokumen; realisasi 2 Dokumen (100%)
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya target 157 Paket; realisasi 157 Paket (100%)

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan target 15 Orang; realisasi 15 Orang (100%)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor target 5 Paket; realisasi 5 Paket (100%)
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor target 20 Paket; realisasi 20 Paket (100%)
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Target 8 Paket Realisasi 8 Paket (100%)
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan target 4 Paket; Realisasi 4 Paket (100%)
5. Penyediaan Bahan/Material target 10 Paket; realisasi 9 Paket (90%)
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target 200 Laporan; realisasi 121 Laporan (60,50%)
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD target 500 Dokumen; Realisasi 360 Dokumen (72%)
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD target 3 Dokumen; realisasi 3 Dokumen (100%)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel target 215 Unit; realisasi 215 Unit (100%)
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya target 200 Unit; realisasi 200 Unit (100%)
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target 2 Unit; realisasi 2 Unit (100%)

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat target 3 Laporan; realisasi 3 Laporan (100%)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik target 12 Laporan; realisasi 12 Laporan (100%)
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor target 12 Laporan; realisasi 12 Laporan (100%)

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target 7 Unit; realisasi 7 Unit (100%)
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target 29 Unit; realisasi 29 Unit (100%)
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya target 78 Unit; realisasi 78 Unit (100%)
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target 5 Unit; realisasi 4 Unit (80%)
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target 41 Unit; realisasi 41 Unit (100%)

b. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang target 1 Dokumen; realisasi 1 Dokumen (100%)

Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota target 60 Orang; realisasi 60 Orang (100%)
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota target 20 Orang; realisasi 20 Orang (100%)
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota target 237 Lembaga; realisasi 237 Lembaga (100%)
4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) target 5 Sertifikat; realisasi 5 Sertifikat (100%)

c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Kegiatan : Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal target 5 Orang; realisasi 12 (240%).

d. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Permakanan target 800 Orang; realisasi 815 Orang (101%).

2. Penyediaan Sandang target 200 Orang; realisasi 188 Orang (94%).
3. Penyediaan Alat Bantu target 150 Orang; realisasi 90 Orang (60%)
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga target 50 Orang; realisasi 83 Orang (166%)
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial target 118 Orang; realisasi 153 Orang (129 %).
6. Pemberian Layanan Kedaruratan target 50 Orang; realisasi 25 Orang (50%)
7. Pemberian Layanan Rujukan target 100 Orang; realisasi 100 Orang (100%)

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan :

1. Pemberian Layanan Kedaruratan target 75 Orang; realisasi 96 Orang (128%).
2. Penyediaan Permakanan target 200 Orang; realisasi 80 Orang (40%)
3. Penyediaan Sandang target 200 Orang; realisasi 80 Orang (40%)
4. Penyediaan Alat Bantu target 20 Orang; realisasi 20 Orang (100%)
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial target 100 Orang; realisasi 80 Orang (80%)
6. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga target 100 Orang; realisasi 49 Orang (49%).
7. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota target 2 Dokumen; realisasi 2 Dokumen (100%).

e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Sub Kegiatan :

1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar target 25 Orang; realisasi 25 Orang (100%).

Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota target 175.000 Orang; realisasi 175.000 Orang (100%).
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota target 40.919 Keluarga; realisasi 40.919 Keluarga (100%).
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga target 1.358 KK; realisasi 1.358 KK (100%)
4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat target 75 Orang; realisasi 75 Orang (100%)

f. Program Penanganan Bencana

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Makanan target 1.500 KK; realisasi 2.348 KK (156%)
2. Penyediaan Sandang target 1.500 KK; realisasi 1.946 KK (129%)

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana target 4 Desa; realisasi 4 Desa (100%).
2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana target 25 Orang; realisasi 24 Orang (96%).

g. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota target 2 Dokumen; realisasi 2 Dokumen (100%)
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota target 2 Makam; realisasi 2 Makam (100%)

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA_PD Tahun 2024 hingga semester pertama secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar : 1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja- PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	92,45	81	67,46	83,28	82	85,00	80,31
1	06	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian	40	28	6	6	100,00	2	36	90,00
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	120	72	12	12	100,00	12	96	80,00
1	06	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	18	8	4	4	100,00	4	16	88,89
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	20	12	2	2	100,00	2	16	80,00
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	44	24	8	8	100,00	8	40	90,91
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial										Lembar : 2				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja- PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	94	93,3	88	90	102,27	90	90	95,74
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	250	50	50	50	100,00	50	150	60,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	94	93,3	88	90	102,27	90	90	95,74
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial										Lembar : 3				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja- PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyangdang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangdang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	7650	5568	1468	1439	98,02	1250	8257	107,93
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyangdang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	1557	645	595	405	68,07	695	1745	112,07
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	100	89,59	100	89,59	89,59	100	93,06	93,06
						Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99	94	96,6	97	100,41	98	96,33	97,31

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial										Lembar : 4				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja- PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak- anak terlantar	25	25	25	25	100,00	25	25	100,00
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	20	4	4	4	100,00	4	4	20,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Sosial.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA-PD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP	78,00	79,00	81,00	82,00	84,00	83,48	92,45	67,49	82,00	82,50	
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	SPM / IKK Outcome	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,63	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	SPM / IKK Outcome	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS SOSIAL

1. Tingkat Kinerja Pelayanan DINAS SOSIAL

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya tergambar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Wajib Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari ketersediaan sarana sosial, persentasi PMKS yang ditangani dan diberikan bantuan sosial.

Indikator persentasi penanganan PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 sebesar 97,68 % dari target sebesar 97 % atau tercapai 100,70%. Angka ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2023 dimana dari target pelayanan terhadap PMKS sebesar 96 % tercapai sebesar 98,72% atau tingkat persentase 102,87%. Khusus untuk penanganan kelompok sasaran yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal terlayani 100 % sama seperti pada tahun 2023 terlayani sebesar 100%. Namun dari jumlah kelompok sasaran yang harus dilayani dan yang terlayani mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 jumlah PMKS yang ada dan yang terlayani sebanyak 15.188 orang. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan jumlah PMKS yang harus dilayani dan yang terlayani tersisa sebanyak 6.462 orang. Data ini menunjukkan bahwa PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan dan berhasil dilayani oleh Dinas Sosial dengan signifikan.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DINAS SOSIAL

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tergambar dari pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilakukan melalui identifikasi permasalahan tabel sebagai berikut :

Tabel
Identifikasi Permasalahan
Pelayanan

Aspek Kajian	Permasalahan
Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.	a. Belum tersedia aturan hukum lokal yang mengatur kriteria kemiskinan yang berbasis pada kearifan local. b. Kurangnya tenaga terampil aparatur di Desa dan Kelurahan dalam proses pemutakhiran Data. c. Masih tingginya subyektifitas petugas pengolah data di kelurahan maupun desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data. d. Tingkat akurasi data yang masih rendah.
Bantuan stimulan bagi fakir miskin dan pendampingannya.	a. Sarana dan prasarana bantuan stimulant dan pendampingannya bagi fakir miskin belum tersedia anggarannya. b. Belum tersedia tenaga fungsional pendamping sosial.

Aspek Kajian	Permasalahan
Sarana dan prasarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	a. Sarana prasarana panti sosial kurang memadai b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan standar pelayanan panti c. Belum tersedia panti rehabilitasi bagi ABH d. Belum tersedia pekerja sosial fungsional
Pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana selama masatanggap darurat	a. Kuantitas dan kualitas TAGANA masih kurang b. Kendaraan lapangan untuk penanganan bencana dalam kondisi rusak.
Aspek Kajian	Permasalahan
Pelayanan sosial anak terlantardiluar panti	a. Kurangnya tenaga pendamping sosial untuk pelayanan diluar panti b. Sarana prasarana penunjang pelayanan belum tersedia
Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan trauma	a. Kurangnya instruktur vokasional bagi penyandang cacat dan trauma b. belum adanya perda yang mengatur tentang pelayanan sosial bagi penyandang cacat c. sarana prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat masih terbatas
Pelayanan kesejahteraan sosial melalui UPT	a. Keterbatasan sarana prasarana sehingga daya tampung sangat terbatas b. Kurangnya petugas yang memiliki bekal ketrampilan teknis pelayanan kesejahteraan anak melalui panti c. Kurangnya pengetahuan petugas tentang standar pelayanan lembaga

Aspek Kajian	Permasalahan
	kesejahteraan sosial
PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	a. Belum optimalnya peran PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial b. Kuantitas dan kualitas PSKS yang masih kurang

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mewujudkan beberapa indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa permasalahan tersebut ada yang saling memiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perlunya Updating data pemerlu pelayanan terutama Basis Data Terpaduyang saat ini dijadikan acuan mutlak dalam melaksanakan pelayanan.
2. Kurangnya kualitas SDM aparatur pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial
3. Kurang memadainya sarana prasarana penunjang pelayanan
4. Kurang tersedianya regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman secara teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih merupakan pedoman sekaligus sasaran yang ingin dituju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum program yang ditujukan untuk mencapai misi dilaksanakan, dilakukan analisa terhadap permasalahan dan

factor-faktor yang mungkin dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan program tersebut. Telaah terhadap kemungkinan adanya faktor penghambat ataupun pendukung pelaksanaan program ditampilkan dalam tabel berikut ini;

Tabel ;
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Terbaik dalam pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial			
	Program Pemberdayaan Sosial	Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber KesejahteraanS osial (PSKS)	Keterbatasan kapasitas dan kompetensi	Regulasi dan program penguatan PSKS dari Kemensos maupun dinas sosial
	Program Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Kapasitas SDM internal yang terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas	Tenaga pendamping sosial terbatas atau tidak sesuai kualifikasi Kurangnya pelatihan teknis tentang	

Visi : Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Terbaik dalam pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial			
			manajemen program sosial	
		Masih belum optimalnya peningkatan keberfungsian sosial secara menyeluruh	Belum optimalnya komunikasi, informasi dan edukasi	Faktor individu yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, pendidikan dan keterampilan serta motivasi / kepercayaan diri
				Faktor keluarga dengan memberikan suport dan keharmonisan
				Faktor lingkungan sosial / masyarakat yang inklusif dan suportif serta nilai / norma sosial yang positif

Visi : Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Terbaik dalam pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial			
		Belum tersedianya panti milik panti rehabilitasi PMKS	Kuota Panti milik Provinsi terbatas	Upaya dilakukan melalui rehabilitasi berbasis masyarakat
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data yang tidak akurat atau tidak mutakhir	Kendala geografis dan aksesibilitas wilayah	Komitmen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
			Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat soal pentingnya DTKS	
		Kapasitas SDM internal yang terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas	Kurangnya pelatihan teknis tentang manajemen program sosial kualifikasi	Komitmen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Visi : Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Terbaik dalam pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial			
			Kurangnya pelatihan teknis tentang manajemen program sosial	
		Belum meratanya bantuan sosial dan layanan jaminan sosial yang diberikan	Belum optimalnya koordinasi antara instansi / lembaga	Komitmen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
			Belum optimalnya monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial	
	Program Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Masih sulitnya akses distribusi bantuan korban bencana	Akses geografis yang sulit	Kesiapan logistik pangan dan sandang
			Masih kurangnya kuantitas dan kualitas relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Tersedianya relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Memperhatikan beberapa program yang disajikan untuk mencapai misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu dilakukan beberapa penajaman terhadap indikator kinerja (outcome) dan program yang disajikan. Selain melakukan penajaman terhadap indikator kinerja dan mempertimbangkan ulang untuk menghapus nama beberapa program, dipandang perlu juga untuk Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Kementerian Sosial RI agar terjadi pula keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah. program baru didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024. Adapun program yang dipandang penting dalam upaya menyelaraskan dengan Rencana Kerja Daerah adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Mengacu pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi PMKS yang termasuk dalam katagori kelompok yang memerlukan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan pendekatan persuasive, motovatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

SPM mengatur kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penguatan kelembagaan,

infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasarluar panti bagi anak terlantar, Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis terlantar.

2. Program Perlindungan dan jaminan sosial.

Program ini menitik beratkan sasaranya pada peningkatan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif, indikator sasaran program ini diantaranya adalah presentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandirianya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar dan presentase korban bencana dan kelompokrentan.

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini penting untuk untuk dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam upaya penanggulanagn Kemiskinan Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini mencoba memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan arah dan Kebijakan Kemntrian Sosial Republik Indonesia. Sasaran program ini adalah Lembaga Swadaya masyarakat yang bergerak dalam penanganan masalah sosial baik organisasi maupun perorangan.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan DINAS SOSIAL

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah sosial yang sifatnya sangat dinamis. Perkembangan masalah sosial terjadi seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat. Tantangan utama yang akan dialami oleh Dinas

Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan pelayanan adalah kaderisasi sumberdaya manusia. Mulai tahun 2021 sampai tahun 2026 akan banyak pegawai Dinas Sosial yang memasuki usia pensiun. Mereka terdiri dari pegawai yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dan pegawai yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sejak awal bertugas sebagai pegawai.

Tantangan yang dihadapi ini disisi lain merupakan peluang bagi Dinas Sosial untuk mengembangkan pelayanan. Pensiunnya pegawai senior ini memberikan peluang bagi pegawai yang ada untuk mengembangkan diri melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional. Peluang lain yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan ini tentunya dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut sebagian merupakan tugas fungsi Dinas Sosial.

5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis

Memperhatikan beberapa permasalahan yang dialami Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok. Kelompok permasalahan ini merupakan masalah strategis yang merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa isu strategis tersebut meliputi :

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial

2. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
4. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Bupati Kutai Kartanegara, ditetapkan melalui serangkaian kebijakan dan program. Strategi ini sejalan dengan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030, yang ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi IDAMAN TERBAIK. Adapun kebijakan dan program tersebut sebagai berikut :

1. Kebijakan : Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas berikut ini :

a. Program Pembinaan Anak Terlantar

Anak adalah generasi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya permasalahan pada anak dapat berdampak pada masa depan anak yang juga masa depan bangsa. Pembinaan terhadap anak terlantar dilakukan agar anak dapat menjalankan tugas perkembangannya dengan baik, sehingga menjadi manusia dewasa yang sejahtera. Pembinaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dan mempersiapkan anak memasuki masa dewasa.

b. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- c. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

2. Kebijakan : Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas :

- a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Didalam masyarakat sudah terdapat upaya-upaya yang melembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya ini ada yang dilaksanakan dalam lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas manajemen pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan
- c. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial
- d. Program Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara

mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkankan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2026 serta prospek tahun 2026 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 di tetapkan sebagai berikut :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					37.118.380.499				37.118.380.499
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 Nilai	15.387.210.499		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 Nilai	15.387.210.499	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tercapainya Nilai SAKIP	75 Nilai	600.000.000		Tercapainya Nilai SAKIP	75 Nilai	600.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	50.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	100.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	150.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.413.587.375		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.413.587.375	

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/Bulan	12.063.587.375	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/Bulan	12.063.587.375	P1 = Wajib dan Mengikat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	275.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	275.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	15 Laporan	200.000.000		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	15 Laporan	200.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	50.000.000		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	50.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	25.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	150.000.000		Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	150.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	153 Paket	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	153 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Waskat ASN
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	50.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	100.000.000	Dalam rangka memenuhi target 20 JP per tahun bagi PNS
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	424.357.200		Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	424.357.200	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.110.200	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.110.200	Lampu untuk kebutuhan Kantor, Aula, Gedung RTPC dan LKB
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.247.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.247.000	Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu, Makan Minum Beseprah, Makan dan Minum Pawai, Logistik Kebersihan Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000	Cetak Map Dinas, Lembar Disposisi
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	Bahan Material Pameran, Pawai, dll

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	100.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	815.315.296		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	815.315.296	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	565.315.296	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	565.315.296	P1 = Wajib dan Mengikat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 Persen	783.950.628		Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 Persen	783.950.628	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000	Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	83.950.628	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	83.950.628	Mobil Dapur Umum 1 Unit, Truk, Pick Up dan Operasional Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	50.000.000	Pemeliharaan service komputer, printer, dll
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000.000	Pemeliharaan AC, Peralatan Kantor, Gedung, dll

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		7.058.800.000		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	0	7.058.800.000	
	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial					0		
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	50 Orang	75.000.000		Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	50 Orang	75.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	75.000.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	6.983.800.000		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	6.983.800.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Lembaga	480.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Lembaga	480.000.000	Karang Taruna, LKS
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	79 Orang	868.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79 Orang	868.800.000	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	75.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	237 Lembaga	4.466.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	237 Lembaga	4.466.000.000	PUSKESSOS

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	944.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	944.000.000	PSM, PEKSOS, TSKS
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	20 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	20 Orang	150.000.000	
Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah		Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	25 Lembaga	0		Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	25 Lembaga	0	
Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	25 Lembaga	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		25 Lembaga	0	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 Persen	25.000.000		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 Persen	25.000.000	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	100 Persen	25.000.000		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	100 Persen	25.000.000	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	5 Orang	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	5 Orang	25.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	100 Persen	5.693.370.000		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	100 Persen	5.693.370.000	
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya							
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya							
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya							
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya							
		Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas							
		Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia							
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	2109 Orang	5.118.370.000		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	2109 Orang	5.118.370.000	
Penyediaan Permakanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	355 Orang	3.575.850.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	355 Orang	3.575.850.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	287.520.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	287.520.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	400.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	400.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	200.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	130.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	130.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	150.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	30 Orang	150.000.000		Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	30 Orang	150.000.000	

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	595 Orang	575.000.000		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS	595 Orang	575.000.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	25 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Permakanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	150.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	40.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	40.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	80 Persen	3.904.000.000		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	80 Persen	3.904.000.000	
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi							
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin							
		Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar							
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi							
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan							

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang	850.000.000		Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang	850.000.000	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	850.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	850.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100 Persen	3.054.000.000		Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100 Persen	3.054.000.000	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	119540 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	119540 Orang	200.000.000	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	30 Orang	250.000.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	2.504.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	500 Orang	2.504.000.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1200 Usulan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1200 Usulan	100.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 Persen	1.550.000.000		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 Persen	1.550.000.000	
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya							
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial							

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100 Persen	900.000.000		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100 Persen	900.000.000	
Penyediaan Makanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	500.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	150.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	100.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	550.000.000		Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	550.000.000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Desa	350.000.000	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Desa	350.000.000	

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL									
RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	200.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	100.000.000	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	100.000.000	
Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	19 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	19 Orang	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 Persen	3.500.000.000		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 Persen	3.500.000.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 Persen	3.500.000.000		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 Persen	3.500.000.000	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.150.000.000	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.150.000.000	Tempat peringatan Hari Pahlawan dan Peristiwa Merah Putih
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	91 Makam	350.000.000	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	91 Makam	350.000.000	Tempat peringatan Hari Pahlawan dan Peristiwa Merah Putih
				37.118.380.499					37.118.380.499

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 meliputi 7 (Tujuh) program yang dilaksanakan dalam 18 (Delapan Belas) kegiatan, dan 76 (Tujuh Puluh Enam) sub kegiatan. Adapun target sasaran dan target output yang akan dicapai pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	3 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Laporan	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Data	
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Berita Acara	
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	120 orang/ Bulan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emeste SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Laporan	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	8 Laporan	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	15 Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Paket	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Paket	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Paket	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Melayu	2 Paket	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Paket	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	10 Laporan	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Unit	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Unit	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	70 Unit	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Unit	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Dokumen	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285 Lembaga	
2	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Orang	
3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
4	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237 Lembaga	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	50 Orang	
5	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Orang	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan keDesa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Orang	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	355 Orang	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	100 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	50 Orang	
8	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	30 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	30 Orang	
10	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	30 Orang	
11	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	30 Orang	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	25 Orang	
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	
3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	
5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu	10 Orang	
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	
11	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119540 Orang	
2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	
4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200 Usulan	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	
4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	
5	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kotadar urat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja, Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Muara	12 Desa/ Kelurahan	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		Kabupaten/Kota	Kaman, Sebulu		
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Orang	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
1	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	19 Orang	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	91 Makam	

Berdasarkan proses perencanaan yang telah dilaksanakan terdapat beberapa usulan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran pihak legislatif yang terkait dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan bidang sosial yang telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk tahun anggaran 2026 yaitu :

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara							
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial							
No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan Anak Swasta/Non Pemerintah	ID SIPD: 2290591 Pemohonan : Bantuan Sarana Prasarana Alat Musik Gereja GKII Permasalahan : belum memiliki alat musik yang memadai untuk sarana prasarana didalam Gereja GKII Pulau Pinang. Lokasi : Tersedia Alamat : Desa Pulau Pinang, RT.01 #OPD: Dinas Sosial		Desa Pulau Pinang, RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Alat Musik	1 Paket	Belum Prioritas Catatan : Usulan belum dapat dipenuhi karena : 1. tidak sesuai dengan kamus usulan OPD 2. Dinsos tidak memberikan pembinaan dan bantuan ke beragaman umat beragama 3. Mungkin bisa dialihkan ke OPD pengampu terkait perihal permohonan usulan ini (Kesra/Kesbangpol/ Dispora)
2	Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan Anak Swasta/Non Pemerintah	ID SIPD: 2252118 Rehab Dinding dan Atap Panti Asuhan Raudatul Amin #OPD: Dinas Sosial		RT. 06, Kab. Kutai Kartanegara	Rehab Dinding dan Atap	1 Paket	Belum Prioritas Catatan : Usulan belum dapat dipenuhi karena : 1. Persyaratan belum dilengkapi 2. sesuaikan dengan kamus usulan OPD (rehab sederhana)
3	Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan Anak Swasta/Non Pemerintah	ID SIPD: 2237574 memohon pengadaan sarana dan prasarana Tenda untuk Desa Segihan #OPD: Dinas Sosial		Desa Segihan Kecamatan Sebulu	Tenda	1 Paket	Belum Prioritas Catatan : usulan belum bisa disetujui karena : 1. Persyaratan belum lengkap/tidak ada 2. Tidak sesuai dengan kamus usulan yang ada di OPD 3. Dinsos memberikan pemberdayaan pada kelembagaan dalam hal ini melalui karang taruna desa bukan langsung ke desa
4	Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan Anak Swasta/Non Pemerintah	ID SIPD: 2364520 bantuan sarana prasarana panti asuhan marhamah kukar #OPD: Dinas Sosial		Dusun Marangan RT. 08 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara	Sarana Prasarana Panti Asuhan	1 Paket	Untuk pekerjaan panti asuhan bukan menjadi kewenangan Dinas Sosial. Sarana Prasarana dimaksud dalam kamus usulan berupa perabot/meubelair, tempat tidur, dll

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Salah satu lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan adalah sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai
Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
Sosial Tahun 2025-2029

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Target Kemiskinan di bawah 4,5 % – 5 %	1. Sumber data yang akan dijadikan basis data belum tersedia dengan mudah dan cepat 2. Koordinasi dengan instansi penyedia data belum berjalan dengan baik, karena adanya pembatasan kewenangan	1. Belum terintegrasinya aplikasi pengolah dan penyedia data PMKS dengan basis data kemiskinan 2. Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan basis data kemiskinan dan PMKS	Memberikan peluang kerjasama dengan instansi penyedia data untuk meningkatkan kualitas basis data dalam mendukung pencapaian sasaran

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2	Isu strategis Kemensos mengenai <i>Care Economy</i> (ekonomi perawatan) untuk lansia dan disabilitas. Amanat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial di daerah. Pentingnya Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Lansia dan Disabilitas	1. Belum optimalnya pelayanan dasar perlindungan sosial. 2. Fasilitas public yang belum optimal bagi semua kalangan, terutama lansia dan penyandang disabilitas. 3. Belum terintegrasinya pelayanan publik	1. Keterbatasan SDM, anggaran dan kapasitas daerah 2. Masih kurangnya fasilitas care center (pusat perawatan) terutama untuk lansia dan disabilitas 3. DTKS belum menggambarkan populasi lansia dan disabilitas secara valid	1. Kesadaran dan komitmen pemerintah daerah 2. Kolaborasi seluruh stakeholder. 3. Penguatan peran Pekerja Sosial dan Pendamping
3	Tuntutan profesionalisme dalam pelayanan sosial.	1. Kurangnya tenaga kesejahteraan sosial (Pekerja Sosial, TKSK) untuk pendataan dan pendampingan PMKS	1. Tidak-seimbangan antara beban kerja dan kapasitas SDM serta rewards / penghasilan yang diberikan. 2. Belum optimalnya penerapan standar etika dan kompetensi. 3. Belum optimalnya penguatan peran lembaga sosial dan perlindungan sosial	1. Tersedianya pendidikan dan pelatihan teknis dari Kemensos 2. Regulasi dan kebijakan pendukung terkait pelayanan kesejahteraan sosial 3. Kolaborasi antara LSM, Perguruan Tinggi dengan Komunitas
4	Pergeseran paradigma dari bantuan sosial (<i>charity</i>) ke pemberdayaan (<i>empowerment</i>) untuk mengurangi ketergantungan. Pentingnya Dimensi Keberdayaan Ekonomi dan Peranan Sosial dalam IKESOS.	1. Ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial. 2. Belum optimalnya pengembangan ketahanan sosial dan pelestarian budaya dalam upaya menuju masyarakat berbudaya maju	1. Mentalitas ketergantungan pada bantuan. 2. Rendahnya kapasitas SDM penerima bantuan 3. Keterbatasan akses terhadap modal dan peluang usaha. 4. Design program pemberdayaan yang kurang kontekstual. 5. Monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan	1. Kebijakan Nasional Program Graduasi. 2. Komitmen pemerintah daerah untuk peningkatan pemberdayaan 3. Perubahan mindset masyarakat terutama dari kaum muda yang memiliki potensi diri 4. Dukungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			yang belum optimal	lembaga swadaya / masyarakat serta dunia usaha / CSR
5	Sekolah Rakyat	1. Belum adanya regulasi atau kebijakan daerah yang jelas. 2. Keterbatasan SDM dan tenaga pendidik yang terlatih	1. Belum terintegrasi-nya data anak rentan dengan Sekolah Rakyat. 2. Belum optimalnya integrasi lintas sektoral 3. Masih adanya potensi tumpang tindih tupoksi dengan instansi / lembaga lain	1. Kebutuhan riil dari masyarakat marginal. 2. Mandar perlindungan untuk kelompok rentan. 3. Komitmen pengurangan ketimpangan sosial

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinsos Prov Kalimantan Timur
Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov Kaltim	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Kuantitas dan Kualitas tenaga SDM Kesejahteraan Sosial yang masih kurang. 2. Rendahnya pemahaman tentang profesi sebagai Pekerja Sosial dan Pendamping	1. Konsentrasi tenaga sosial yang belum menyebar secara merata. 2. Belum adanya sistem pemantauan yang efektif untuk menilai keberhasilan penguatan kapasitas	1. Tersedianya pelatihan, sertifikasi dan pendidikan formal bagi pekerja sosial. 2. Kemitraan dan Kolaborasi
2	Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi penyandang masalah sosial	1. Kuantitas dan Kualitas tenaga SDM Kesejahteraan Sosial yang masih kurang. 2. Fasilitas rehabilitasi dan pusat layanan sosial yang masih belum memadai. 3. Koordinasi antara lembaga yang masih belum optimal. 4. Data dan	1. Kuantitas dan Kualitas tenaga SDM Kesejahteraan Sosial yang 2. Koordinasi antara lembaga yang masih belum optimal	1. Komitmen Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan 2. Kemitraan dan kolaborasi multi-sektor 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov Kaltim	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		informasi yang belum terpadu. 5. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitas dan perlindungan sosial.		
3	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi kelompok rentan	1. Kurangnya data akurat dan terpadu terkait potensi kelompok rentan yang akan diberdayakan 2. Kapasitas SDM yang terbatas 3. Belum optimalnya koordinasi dan sinerga antar lembaga 4. Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap keberhasilan dan dampak program pemberdayaan secara sistematis	1. Data sasaran yang kurang lengkap menyebabkan program kurang tepat sasaran 2. Tumpang tindih program dan kurang sinergi antar lembaga terkait. 3. Lokasi geografis sulit dijangkau dan sosialisasi program kurang maksimal. 4. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan yang belum tersedia dengan baik	1. Adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung program pemberdayaan 2. Komitmen dan kapasitas SDM Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial 3. Kemitraan multi-sektor 4. Kelompok sasaran yang aktif dan termotivasi untuk mengikuti program pemberdayaan

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA_PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;

6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:
 - a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
 - b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
 - c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
 - d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
 - e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
 - f) *continously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dalam tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRAPD		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRAPD
					2025 (target)	2025 (realisasi)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya	Rata-rata persentase penurunan PMKS Potensial per tahun	Persen	6,60%	6,60%	8,70%	10,80%	12,20%	14,60%	16,80%	16,80%
			Persentase PMKS (Sasaran SPM) yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Dinas Sosial adalah “ ***Memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar perlindungan sosial*** “.

Selanjutnya dari 17 Program prioritas / dedikasi KUKAR IDAMAN TERBAIK terdapat 1 (satu) program yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu program KUKAR ETAM SEJAHTERA dengan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pra-sejahtera berupa bantuan pangan, sandang dan kebutuhan dasar lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial.

2. Pencapaian SDGs

Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Dinas Sosial memberikan kontribusi dalam penanganan dan upaya penegentasan

kemiskinan. Terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang disasarkan kepada kelompok marginal. Dalam hal penanganan kemiskinan, masyarakat Kutai Kartanegara yang masuk didalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS yang merupakan pengembangan dari DTKS Kementrian Sosial RI.

3. Pengentasan Kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada Dinas Sosial saja, karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainnya. Dinas Sosial berfungsi lebih kepada upaya pemenuhan jaminan hidup dan fasilitasi terhadap aksesibilitas warga miskin dalam memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu kolaborasi antar seluruh stake holder terkait sangat diperlukan dalam memecahkan masalah pengentasan kemiskinan dan harapanya Dinas Sosial ada digarda terdepan dalam upaya upaya tersebut, bukan berarti sebagai penanggungjawab utama tetapi lebih kepada perumusan strategi penanganan kemiskinan yang tepat dan sesuai dengan karakter kemiskinan wilayah.

4. Pemadanan data kesejahteraan sosial antara DTKS, Data P3KE dan Data REGSOSEK menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Pemadanan DTKS, P3KE, dan Regsosek menjadi **DTSEN** adalah langkah strategis pemerintah untuk membangun sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis **data tunggal, valid, dan terintegrasi nasional**. Hal ini akan mempercepat penurunan kemiskinan, mengurangi ketimpangan,

dan memastikan **tidak ada satu pun warga yang tertinggal** dari akses layanan sosial.

5. Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang menjadi tanggung jawab instansi Sosial di daerah menurut Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang SPM bidang Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diantaranya :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial.
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Dalam hal ketersediaan anggaran Perangkat daerah telah berupaya melakukan pemenuhan terhadap SPM tersebut.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Pada tahun anggaran 2026 Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Sosial sebanyak 7 Program dengan 18 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi

kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan dan ada juga yang terfokus ke satu Kecamatan atau Desa jika jenis kegiatannya bersifat Pelatihan Ketrampilan.

3. Total kebutuhan dana / pagu indikatif pada Rancangan Awal RENJA Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 37.118.380.499,-

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2026 dan Perkiraan maju Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara :

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

Kode					RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					37.118.380.499			37.118.380.499
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75 Nilai	15.387.210.499			80 Nilai	17.067.210.499
1	06	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP		75 Nilai	600.000.000			80 Nilai	785.000.000
1	06	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Dokumen	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	3 Dokumen	150.000.000
1	06	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				P1 = Wajib dan Mengikat	100 Dokumen	25.000.000
1	06	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				P1 = Wajib dan Mengikat	100 Dokumen	20.000.000
1	06	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				P1 = Wajib dan Mengikat	100 Dokumen	40.000.000
1	06	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				P1 = Wajib dan Mengikat	100 Dokumen	25.000.000
1	06	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Laporan	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	6 Laporan	50.000.000
1	06	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	8 Laporan	175.000.000
1	06	01	2,01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	50.000.000
1	06	01	2,01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Data	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Data	150.000.000
1	06	01	2,01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Berita Acara	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Berita Acara	50.000.000
1	06	01	2,01	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	50.000.000
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	12.413.587.375			20 Laporan	12.413.587.375
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	120 Orang/Bulan	12.063.587.375	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	120 Orang/Bulan	12.063.587.375
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Laporan	50.000.000
1	06	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	275.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	275.000.000
1	06	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	25.000.000

Kode				RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	06	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		15 Laporan	200.000.000			15 Laporan	200.000.000
1	06	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Dokumen	25.000.000
1	06	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Laporan	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Laporan	50.000.000
1	06	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	8 Laporan	25.000.000
1	06	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	1 Laporan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Laporan	100.000.000
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial		2 Dokumen	150.000.000			2 Dokumen	550.000.000
1	06	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	153 Paket	0	APBD (Dana Bagi Hasil)		200 Paket	250.000.000
1	06	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	2 Dokumen	50.000.000
1	06	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Orang	150.000.000
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	15 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		15 Orang	100.000.000
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial		8 Layanan	424.357.200			8 Layanan	528.307.828
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Paket	5.110.200	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Paket	8.307.828
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Paket	59.247.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Paket	75.000.000
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Paket	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		4 Paket	150.000.000
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Paket	60.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Paket	60.000.000
1	06	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Paket	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		3 Paket	50.000.000
1	06	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			APBD (Dana Bagi Hasil)		12 Laporan	35.000.000
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		10 Laporan	100.000.000
1	06	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Dokumen	30.000.000
1	06	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	20.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	20.000.000

Kode				RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	06	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan						100 Persen	75.000.000
1	06	01	2,07	01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan						5 Unit	75.000.000
1	06	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	815.315.296			12 Bulan	915.315.296
1	06	01	2,08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	350.000.000
1	06	01	2,08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	565.315.296	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	565.315.296
1	06	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial		100 Persen	783.950.628			100 Persen	1.600.000.000
1	06	01	2,09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Unit	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		6 Unit	150.000.000
1	06	01	2,09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Unit	83.950.628	APBD (Dana Bagi Hasil)		3 Unit	150.000.000
1	06	01	2,09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	70 Unit	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		70 Unit	100.000.000
1	06	01	2,09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Unit	600.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Unit	1.200.000.000
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial			7.058.800.000			88 Persen	7.358.800.000
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial							
1	06	02	2,02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan		50 Orang	75.000.000			50 Orang	75.000.000
1	06	02	2,02	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	75.000.000
1	06	02	2,03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan		100 Persen	6.983.800.000			100 Persen	7.158.800.000
1	06	02	2,03	04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285 Lembaga	480.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		285 Lembaga	480.000.000
1	06	02	2,03	07 Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			APBD (Dana Bagi Hasil)		200 Aduan	75.000.000
1	06	02	2,03	08 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			APBD (Dana Bagi Hasil)		25 Orang	100.000.000

Kode					RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	06	02	2,03	10	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Orang	868.800.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		79 Orang	868.800.000
1	06	02	2,03	12	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		20 Orang	75.000.000
1	06	02	2,03	13	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237 Lembaga	4.466.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		237 Lembaga	4.466.000.000
1	06	02	2,03	14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	50 Orang	944.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	944.000.000
1	06	02	2,03	15	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		20 Orang	150.000.000
1	06	02	4,04		Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			APBD (Dana Bagi Hasil)			75.000.000
1	06	02	4,04	01	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			APBD (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	75.000.000
1	06	02	4,05		Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			APBD (Dana Bagi Hasil)			50.000.000
1	06	02	4,05	01	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			APBD (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	50.000.000
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan		100 Persen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	50.000.000
						Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani							
1	06	03	2,01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani		100 Persen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	50.000.000
1	06	03	2,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Orang	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		3 Orang	50.000.000

Kode	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)							Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya		100 Persen	5.693.370.000			100 Persen 5.888.370.000
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya						
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya						
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya						
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya						
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas						
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia						
1 06 04 2,01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pant Sosial			Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar pant		2109 Orang	5.118.370.000			2109 Orang 5.313.370.000
1 06 04 2,01 01	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	355 Orang	3.575.850.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	355 Orang 3.575.850.000
1 06 04 2,01 02	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	287.520.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	100 Orang 287.520.000
1 06 04 2,01 03	Penyediaan Alat Bantu			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	400.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	50 Orang 400.000.000
1 06 04 2,01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	25 Orang 200.000.000
1 06 04 2,01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	130.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	70 Orang 300.000.000
1 06 04 2,01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	50 Orang 75.000.000
1 06 04 2,01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	50 Orang 25.000.000
1 06 04 2,01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang 75.000.000

Kode					RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	06	04	2,01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	150.000.000
1	06	04	2,01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	30 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	75.000.000
1	06	04	2,01	15	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	30 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	150.000.000
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti		595 Orang	575.000.000			595 Orang	575.000.000
1	06	04	2,02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	25 Orang	50.000.000
1	06	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	25 Orang	30.000.000
1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	100 Orang	150.000.000
1	06	04	2,02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	50.000.000
1	06	04	2,02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	10 Orang	30.000.000
1	06	04	2,02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu	10 Orang	40.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	10 Orang	40.000.000
1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	50.000.000

Kode					RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	06	04	2,02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	50.000.000
1	06	04	2,02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	15 Orang	50.000.000
1	06	04	2,02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	30 Orang	50.000.000
1	06	04	2,02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	1 Dokumen	25.000.000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar		80 Persen	3.904.000.000			100 Persen 85 Persen	4.629.000.000
						Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi							
						Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin							
						Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar							
						Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi							
						Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan							
1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar		25 Orang	850.000.000			40 Orang	1.000.000.000
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	850.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	40 Orang	1.000.000.000
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		100 Persen	3.054.000.000			100 Persen	3.629.000.000
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119540 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		118345	200.000.000
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	750.000.000
1	06	05	2,02	06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	2.504.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		500 Orang	2.504.000.000

Kode					RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	06	05	2,02	08	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200 Usulan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1200 Usulan	175.000.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		100 Persen	1.550.000.000			100 Persen	1.800.000.000
						Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya							
						Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial							
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani		100 Persen	900.000.000			100 Persen	1.150.000.000
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	500.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	1500 Orang	750.000.000
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	1500 Orang	150.000.000
1	06	06	2,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	75 Orang	75.000.000
1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan Dukungan Psikososial pasca masa tanggap darurat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	150 Orang	75.000.000
1	06	06	2,01	07	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	10 Unit	100.000.000
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana		4 Desa	550.000.000			4 Desa	550.000.000
1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	12 Desa	350.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	4 Desa	350.000.000
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	19 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	19 Orang	200.000.000

Kode				RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	06	06	2,02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	4 Desa	100.000.000			4 Desa	100.000.000
1	06	06	2,02	03	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	19 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	19 Orang	100.000.000
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik		100 Persen	3.500.000.000			100 Persen	325.000.000
1	06	07	2,01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		100 Persen	3.500.000.000			100 Persen	325.000.000
1	06	07	2,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	3.150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	2 Dokumen	0
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	91 Makam	350.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	2 Makam	325.000.000
TOTAL								37.118.380.499				37.118.380.499

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan DINAS SOSIAL tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, proses penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial.
2. Pemadanan data kesejahteraan sosial antara DTKS, P3KE, RESOSEK menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
3. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Kurangnya sinergitas stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam urusan sosial mengacu pada sejumlah kaidah yang bersifat **normatif, strategis, dan operasional**, guna menjamin bahwa program dan kegiatan yang dijalankan mampu mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial secara efektif, efisien, dan berkeadilan dengan memperhatikan khaidah-khaidah :

1. Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Seluruh program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan taraf hidup kelompok rentan dan marginal, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, fakir miskin, korban bencana, dan penyandang masalah sosial lainnya.

2. Akurasi dan Keadilan Sasaran

Pelaksanaan kegiatan harus berbasis pada data yang valid dan mutakhir, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar intervensi sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.

3. Pemberdayaan dan Partisipatif

Kegiatan didorong untuk tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, dengan pendekatan partisipatif, berbasis komunitas, dan mendukung transformasi dari bantuan menjadi pemberdayaan.

4. Responsif terhadap Isu dan Kebutuhan Aktual

Program sosial harus mampu merespon perubahan sosial, bencana, kondisi ekonomi, dan dinamika masyarakat, termasuk memperhatikan isu-isu strategis nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, care economy, dan perlindungan kelompok rentan.

5. Sinergi dan Integrasi Lintas Sektor

Pelaksanaan RKPD bidang sosial harus terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lain, lembaga vertikal, dunia usaha, serta organisasi sosial masyarakat untuk menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan hasil.

6. Akuntabilitas dan Transparansi

Seluruh kegiatan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi anggaran, dan pelaporan berbasis hasil (outcome-based) yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan administratif.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Kegiatan harus disertai dengan pemantauan dan evaluasi berkala, untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

8. Berbasis Inovasi dan Teknologi

Penggunaan teknologi informasi dan pendekatan inovatif didorong dalam pelaksanaan kegiatan sosial, baik dalam pelayanan, pendataan, pelatihan, maupun penyaluran bantuan.

9. Mendorong Kesetaraan dan Inklusi Sosial

Semua kegiatan harus menjunjung prinsip kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan nondiskriminasi, agar tidak ada kelompok yang tertinggal sosial.

c. Rencana tindak lanjut ;

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya aparatur penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
2. Pemadanan data kesejahteraan sosial antara DTKS, P3KE, RESOSEK menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
3. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
4. Sinergitas antar stakeholders dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) PD berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah selama satu tahun anggaran. Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program / kegiatan / sub kegiatan kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan Kinerja ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai.

Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja PD tahun 2026 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara serta memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Tenggarong, 14 Agustus 2026



Plt. Kepala Dinas,

Drs. Yuliandris Suherdiman

Pembina Tk. 1

NIP. 19680708 199403 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512
T E N G G A R O N G

Email : dinsos@kukarkab.go.id Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-14/SET.1/000.7.2.4/03/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
DAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2026 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 DAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

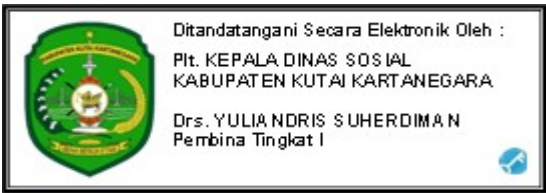
KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tepat waktu;
- g. melaporkan hasilnya kepada Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggara
Pada tanggal : 25 Maret 2025



Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR : B-14/SET.1/000.7.2.4/03/2025
TANGGAL : 25 Maret 2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 DAN
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 DAN
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Pengarah / Penanggung Jawab | : | Plt. Kepala Dinas |
| Ketua | : | Sekretaris |
| Sekretaris | : | Perencana |
| Anggota | : | 1. Seluruh Pejabat Administrator
2. Seluruh Pejabat Pengawas
3. Seluruh Pejabat Fungsional Tertentu |